



Dugaan Penyimpangan Pembagian PHR Badung 10 Pejabat Setingkat Kabag Keuangan Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Penyelidikan dugaan penyimpangan pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung ke kabupaten/kota se-Bali terus dikebut penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Hingga saat ini, sudah 10 saksi setingkat Kabag Keuangan dari seluruh kabupaten/kota yang diperiksa.

Informasi yang dihimpun, 10 saksi yang diperiksa tersebut berasal dari beberapa kabupaten/kota di Bali. Sebagian besar, saksi yang sudah diperiksa merupakan pejabat daerah yang memiliki jabatan setingkat Kabag Keuangan yang mengetahui tentang pembagian PHR Badung tersebut "Sudah 10 pejabat setingkat Kabag Keuangan yang kami periksa," ujar salah satu jaksa penyidik di Kejati Bali, Jumat (22/5).

Ditambahkannya, setelah pemeriksaan 10 saksi ini, ren-

cananya penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi lainnya, termasuk beberapa pejabat di atas Kabag Keuangan. Namun ia enggan membeber siapa saja yang akan diperiksa dan waktu pemeriksaannya. "Yang pasti nanti ada lagi pejabat pemerintah kabupaten/kota yang diperiksa," ungkapnya.

Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan yang dikonfirmasi mengatakan belum bisa memberikan komentar apapun terkait perkembangan kasus ini. "Saya masih tugas ke luar kota," jelasnya.

Seperti diketahui kasus ini berawal dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana yang mengatakan ada penyimpangan dalam pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung ke kabupaten/kota se-Bali. Ia mengatakan pembagian PHR di Badung tidak

sesuai dengan peruntukan. Pasalnya, PHR yang seharusnya digunakan untuk mendukung pariwisata justru digunakan untuk kepentingan lain.

Ia mengatakan pembagian di luar peruntukan ini jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar Perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata. Sementara mengenai jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, kata Sentana masih didalami. Karena ada dugaan selisih dalam pelaporan dalam pertanggungjawaban di APBD Badung tahun 2014. Menurutnya, besaran nominal yang disebutkan dibagi sekitar Rp 260 miliar lebih. Ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar. Nilai nominal inilah akan didalami karena diduga ada penyelewengan. **rez**

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 5